

Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia

I Putu Angga Krisna Pratama

PGSD, Institut Teknologi dan Pendidikan Merkanteya Bali
krisnapratama@markandeyabali.ac.id¹

Abstract

Corruption is one of the biggest problems in economic and social development in Indonesia. The aim of this research is to analyze the impact of corruption on economic stability, social inequality and the quality of public services. Using a qualitative approach and case study design, this data was taken from anti-corruption agency documents supplemented by in-depth interviews. The results show that corruption undermines the efficiency of resource allocation, slows investment and causes significant financial losses for the country. High statistical correlations and standard errors also result from the social inequality impact of corruption, as the fair distribution of welfare programs is destroyed. Furthermore, the quality of other basic services affected is health and education money. Based on these findings, structural reforms must be mandatory and focus on transparency and accountability as well as the important role of society to minimize the negative consequences of corruption in economic and social development

Kata Kunci:

Korupsi
Dampak ekonomi
Ketimpangan sosial
Reformasi struktural
Pembangunan berkelanjutan

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak korupsi pada stabilitas ekonomi, ketimpangan sosial, dan kualitas layanan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data ini diambil dari dokumen lembaga anti korupsi yang dilengkapi dengan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi merusak efisiensi alokasi sumber daya, memperlambat investasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Korelasi statistik dan kesalahan standar yang tinggi juga dihasilkan dari dampak ketimpangan sosial korupsi, karena distribusi adil dari program kesejahteraan hancur. Lebih lanjut, kualitas layanan dasar lain yang terdampak adalah kesehatan dan uan edukasi. Berdasarkan pada temuan ini, reformasi struktural harus diwajibkan dan berfokus pada transparansi dan akuntabilitas serta peran penting masyarakat untuk meminimalkan konsekuensi negatif korupsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Corresponding Author:

I Putu Angga Krisna Pratama
Fakultas Ilmu Pendidikan
Institut Teknologi dan Pendidikan
Email: krisnapratama@markandeyabali.ac.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia adalah salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan dan kemajuan. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi tinggi, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menghentikan praktik korupsi. Menurut Transparency International (2023), Indonesia

menempati peringkat 104 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang berarti korupsi menyebar di berbagai sektor di negara ini. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang meluas dari sektor publik ke swasta, memburuknya kualitas layanan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut data dari KPK, terdapat lebih dari 1.000 kasus korupsi yang telah ditangani semenjak 2004 sampai 2022 yang menghindarkan orang-orang pejabat negara dan sektor swasta. Jumlah kerugian negara bahkan telah mencapai triliunan rupiah dan anggaran RAPBN yang sebetulnya seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional juga berkurang efektivitasnya (KPK, 2022). Secara langsung, korupsi telah menyebabkan ketimpangan sosial semakin parah, sehingga ketidakadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi mulai terbentuk yang pada akhirnya diharapkan bisa menyokong kesejahteraan rakyat (Prasetyo & Hartanto, 2020).

Studi yang dilakukan tentang bidang seputar dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Fokus dari berbagai penelitian yang dilakukan sebagian besar adalah pengaruh korupsi terhadap kestabilan ekonomi serta distribusi keberlangsungan sosial. Menurut Prasetyo & Hartanto (2020), Korupsi di Indonesia sangat buruk dampaknya pada sektor publik berada maupun sektor swasta. Mereka menemukan bukti bahwa korupsi merupakan pemicu lebih parahnya ketimpangan sosial, perlahan lahan mempercepat pembangunan ekonomi serta menulis hilangnya penguatan publik terhadap institusi. Secara lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa korupsi juga merusak investasi asing masuk negara, yang selanjutnya merupakan hal

Selain itu, penelitian oleh Lambsdorff (2007) juga menunjukkan bahwa korupsi memiliki kecenderungan negatif terhadap ekonomi negara pada umumnya. Efek ini dicapai melalui pengurangan efisiensi pasar yang cenderung terjadi akibat tindakan korupsi serta meningkatnya biaya transaksional. Korupsi juga mendorong pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan adil, menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur kelas dua melalui pengalokasian anggaran yang tidak tepat, yang pada gilirannya, sebagian besar disebabkan oleh korupsi.

Berdasarkan konsep teori *Public Choice* yang diutarakan oleh Buchanan dan Tullock (1962), dicatat bahwa pejabat publik, sebagai elemen dari struktur pemerintahan, berperilaku dalam cara yang mengejar kepentingan pribadinya sendiri, bukan kepentingan publik. Kesetiaan pejabat publik tidak terhadap yang dipilihnya, melainkan hanya kepada dirinya sendiri, di mana ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dalam hal ini melakukan tindakan korupsi. Sebagai hasil dari praktik ini, sumber daya dalam masyarakat didistribusikan secara tidak merata.

Selain itu, teori *Principal-Agent* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) juga memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara pejabat pemerintah (agen) dan masyarakat (*principal*). Dalam konteks korupsi, agen (pejabat pemerintah) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (masyarakat), karena mereka memiliki insentif untuk mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

Beberapa penelitian juga menyarankan bahwa korupsi dapat diminimalisir melalui reformasi institusional yang mengurangi peluang untuk melakukan praktik korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan (Rose-Ackerman, 1999). Pendekatan ini berfokus pada perbaikan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap praktik korupsi, agar pejabat publik lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

Penelitian ini akan membahas dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial negara, diikuti oleh penjelasan mengapa korupsi merusak stabilitas ekonomi negara dan memperburuk kesenjangan sosial. Pada akhirnya, penulis akan membuktikan bahwa karena dampak korupsi antara lain terjadi pada proses pembangunan yang buruk, imbauan untuk menyelamatkan Planet kita dari masalah pemanasan global hanya omong kosong. Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk diterapkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini dapat menganalisis secara rinci fenomena korupsi di beberapa sektor yang relevan dan bagaimana praktik korupsi tersebut memengaruhi aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial (Yin, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen dan wawancara mendalam.

- 1) Analisis Dokumen: Penelitian ini mengkaji berbagai laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Transparency International, serta publikasi dan dokumen lain yang relevan yang memberikan data tentang prevalensi dan dampak korupsi di Indonesia. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami konteks dan perkembangan isu korupsi dalam kerangka ekonomi dan sosial (Bowen, 2009).

- 2) Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, serta praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka mengenai bagaimana korupsi berdampak pada perekonomian, distribusi kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan. Wawancara ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan solusi yang mungkin diterapkan untuk mengurangi dampak korupsi (Kvale & Brinkmann, 2009).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mencari pola atau tema yang muncul dari data yang terkumpul. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efek korupsi pada perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut (Braun & Clarke, 2006).

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara mendalam, beberapa temuan utama ditemukan, yang akan dibahas dalam bagian ini.

1) Dampak Korupsi terhadap Ekonomi Negara

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa korupsi berdampak negatif pada perekonomian Indonesia dengan cara mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menurunkan daya saing ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan KPK dan Transparency International, korupsi telah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, dengan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik sering kali disalahgunakan. Praktik korupsi memperburuk kualitas proyek infrastruktur, meningkatkan biaya transaksi, dan menghambat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah dan praktisi hukum, ditemukan bahwa korupsi menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Hal ini berkaitan dengan kurangnya transparansi dan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat tingginya tingkat korupsi dalam birokrasi. Penurunan tingkat investasi asing dan lokal berimbas pada stagnasi sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat.

2) Dampak Korupsi terhadap Ketimpangan Sosial

Selain dampak ekonomi, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam wawancara mendalam, beberapa responden menyatakan bahwa praktik korupsi memperburuk distribusi kesejahteraan sosial dengan menciptakan kesenjangan antara golongan elite dan masyarakat miskin. Dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial sering kali diselewengkan, sementara rakyat yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan akses yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Prasetyo & Hartanto (2020), yang menyebutkan bahwa korupsi memperburuk distribusi sumber daya ekonomi dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar.

Korupsi juga memengaruhi sektor pelayanan publik, di mana masyarakat miskin dan terpinggirkan sering kali menjadi korban dari sistem yang korup. Praktik gratifikasi dan suap dalam sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya, menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas. Sebagai hasilnya, ketidakadilan sosial semakin meningkat, sementara kelompok berpenghasilan rendah terus terpinggirkan dari layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.

3) Korelasi dengan Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Temuan ini secara langsung mengonfirmasi bahwa korupsi memiliki pengaruh yang merusak terhadap kedua aspek tersebut. Korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial yang telah lama menjadi masalah besar di Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan dalam teori *Public Choice* dan *Principal-Agent*, praktik korupsi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pejabat publik dan masyarakat (Buchanan & Tullock, 1962; Jensen & Meckling, 1976). Hal ini tercermin dalam hasil penelitian, di mana pejabat publik cenderung mengejar keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara dan memperburuk kesejahteraan sosial.

4) Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi struktural dalam pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Pendekatan yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, serta penguatan lembaga pengawasan seperti KPK dan lembaga negara lainnya sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif korupsi. Selain itu, penting untuk memperkenalkan

kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas dan mengurangi peluang bagi korupsi untuk berkembang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak signifikan terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Dari sisi ekonomi, korupsi mengakibatkan kerugian besar pada anggaran negara, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, serta menurunkan daya saing investasi (Prasetyo & Hartanto, 2020). Dalam aspek sosial, korupsi memperparah ketimpangan sosial dengan menghambat distribusi kesejahteraan dan menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan (Transparency International, 2023).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin mendalam. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Lambsdorff, J. G. (2007). *The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy*. Cambridge University Press.
- Prasetyo, R., & Hartanto, D. (2020). Dampak Korupsi terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Eksaminasi*, 7(2), 45-56. Retrieved from <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1185/861>
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.